BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Kajian Kepustakaan Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasan hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yakni :

a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan cara apapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.[1]

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara evolutif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat Madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.[2]

Memberdayakan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat. Kita dalam kondisi sekarang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.[3] Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.[4]

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat secara implisit yang mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi artinya kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dimana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

---

[1] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat ; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hal. 57-58

[2] K. Suhendra, *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2006), hh.74-75

[3] Zubeidi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: AR-RUZ MEDIA, 2007), h. 41

[4] Abd. Basid, *Pemberdayaan Masyarakat*, El-Ijtima', 001 1 No. 1 (Surabaya: IAIN SA, 1999), h. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan tingkat sosial.[5]

Konsep ini lebih luas, akan tetapi hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) menyediakan mekanisme untuk proses mencegah kemiskinan lebih lanjut yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu:

a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
b) Memperkuat potensi atau saja yang dimiliki oleh masyarakat.
c) Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi.[6]

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bukan masyarakat menjadi semakin tergantung pada program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih secara berkesinambungan.

---

[5] Harry Hikmat, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), h. 3.

[6] Abd. Basid, *Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, h. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.

Berdasar konsep dasar demikian diatas, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

a) Upaya harus terarah.
b) Program ini harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan langsung oleh masyarakat yang jadi sasaran.
c) Menggunakan pendekatan kelompok, karena apabila sendiri-sendiri masyarakat sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Maka dari yang disebutkan diatas, pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:[7]

a) Peranan pemerintah teramat penting. Ini berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan misi ini.
b) Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi besar adalah LSM, di samping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah.

---

[7] *Ibid.* 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, disebut *local community organization* seperti karang taruna, PKK, Arisan, dan lain-lain.

d) Koperasi, karena merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha yang paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.

e) Pendamping, penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu diperlihatkan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dan kaum yang termarginalkan lainnya dalam upaya untuk memperbaiki kesejahteraannya.

Dari uraian di atas, maka ada tiga strategi utama advokasi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:[8]

a) Advokasi hak-hak politik rakyat.

b) Penguatan akses rakyat pada sumber daya masyarakat.

c) Pemberdayaan rakyat (pembelaan rakyat dari belenggu dominasi dan hegemoni).

Dalam proses tersebut masyarakat bersama sama:

a) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya

b) Mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian.

c) Menerapkan rencana tersebut.

d) Secara terus menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (monitoring dan evaluasi).[9]

---

[8] Lilik Hamidah, *Pola Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2 Juli (Surabaya: IAIN SA, 2003), hh. 50-51.

[9] Moh. Shofan, *Realistic Education Menuju Masyarakat Utama* (Yogyakarta: Ircisod, 2007), hal. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat di atas jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Pada dasarnya gerakan pemberdayaan ini mengutamakan kepada perlunya power dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya.

a. Strategi pemberdayaan masyarakat

Secara umum, ada 4 strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1) *The growth strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, sektor pertanian, pemodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

2) *The responsive strategy*

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need assistance*) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan. Tetapi karena pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) sendiri belum dilakukan, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistic dan sulit untuk ditransformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang perlu diperhatikan kecepatan teknologi seringkali bahkan selalu tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri, akibatnya teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

3) *The walfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, tetapi karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultural dan budaya mandiri dalam diri masyarakat, maka yang terjadi adalah tingginya sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Karena itulah dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah persoalan kultur dan budaya masyarakat.

4) *The integrated or holistic strategy*

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena kegagalan ketiga strategi seperti hal di atas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat. Karena itulah dalam strategi ini terdapat 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Persamaan, keadilan pemerataan dan partisipasi merupakan tujuan yang secara eksplisit harus ada strategi menyeluruh, maka badan publik yang ditugasi untuk melaksanakan harus:
   (1) Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai interversinya.
   (2) Intervensi dilakukan untuk memperoleh kemampuan masyarakat sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Serta untuk mengambil langkah instrumental yang membutuhkan kemampuan aparatur untuk melakukan intervensi sosial.
b) Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun dalam gaya dan cara bekerja, maka badan publik yang belum memiliki kemampuan intervensi sosial akan melakukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya tercapainya tujuan strategi holistic tersebut, yaitu untuk:
   (1) Menentukan arah nilai organisasi, energi dan proses menuju strategi
   (2) Memelihara integritas organisasi yang didukung oleh *"Institusional leadership"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Keterlibatan badan publik dan organisasi sosial secara terpadu, maka memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supra organisasi yang berfungsi antara lain:

(1) Membangun dan memelihara perspektif menyeluruh

(2) Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan pimpinan kelembagaan.

(3) Membantu mekanisme control untuk saling mengatur keterkaitan antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategi.

Untuk menjaga prinsip tersebut, maka dalam strategi itu diperlukan keterlibatan semua masyarakat yang berkompeten dan bekerja secara profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

2. Pengrajin Batik

Istilah pengrajin berasal dari kata kerajinan yang berarti pemahat dari produk alamiah. Kata rajin sendiri mempunyai makna suka bekerja atau bersungguh-sungguh bekerja. Sedangkan apabila kata tersebut ditambah dengan awalan 'pe' (perajin/pengrajin) mempunyai makna orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja.[10] Pengrajin yang dimaksud disini adalah orang yang memproduksi batik tulis tenun gedog.

Untuk membuat batik menjadi tenun gedog, terdapat beberapa proses kerja yang akan kami uraikan sebagai berikut :

---

[10] Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hal. 811

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, adalah memintal serat kapas. Pada proses pertama ini dimulai dari proses buah kapas menjadi benang lawe, yang meliputi beberapa langkah pengerjaan. Yaitu :

a) Persiapan bahan baku kapas
b) Menghilangkan biji kapas (kapas dibibis)
c) Usoni, yaitu menguraikan (*disentangle*) serat kapas agar mudah dipintal.
d) Menggulung (*roll*) untuk kemudian dibuat bulatan.
e) Diantih (*spin*) dengan menggunakan jontro (alat pemintal, *spinning well*).
f) Dilikasi dengan alat likasan.
g) Distreng atau diukel jadi benang lawe.

Kedua, adalah tenun gedogan. Pada proses kedua ini pembuatan benang lawon putihan. Adapun langkah-langkah yang perlu dipersiapkan adalah :

a) Benang lawe (*lawe yarn*)
b) Benang direbus untuk menghilangkan lemak
c) Penjemuran benang hingga kering.
d) Benang dikanji (*starchel*) dengan nasi jagung atau tepung kanji.
e) Disikati dengan serbut kelapa.
f) Penjemuran benang hingga kering.
g) Benang diulur (*extended*) dengan alat ringan.
h) Dihani untuk menentukan panjang dan lebar kain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Memasukkan benang dalam sisir.

j) Ditenun menjadi kain lawon putih.

Ketiga, membatik lawon. Pada langkah yang terakhir ini adalah proses penciptaan batik tulis tenun gedog. Adapun langkah-langkah pengerjaan atau barang-barang yang perlu dipersiapkan atau urutan untuk membuat kain batik tenun gedog pada proses ketiga ini adalah sebagai berikut :

a) Kain lawon hasil tenun gedogan.

b) Diputihkan; dicuci dengan campuran thepol.

c) Dijemur hingga kering.

d) Dilengkreng atau dipola.

e) Dilengkapi isen-isen.

f) Ditembok dengan lilin malam.

g) Dicelup warna dasar.

h) Diangin-angin hingga kering.

i) Isen-isen (digambar dengan canting)

j) Pencelupan dengan warna yang dikehendaki.

k) Diangin-anginkan hingga kering.

l) Akhirnya menjadi kain batik tenun gedog.[11]

Pentahapan proses tersebut di atas merupakan tahapan yang umum yang selalu dilalui oleh setiap pengrajin batik tulis di Tuban dan justru

[11] http://students.ukdw.ac.id/-22012566, diakses pada hari Jum'at 19 Desember 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada proses seperti itulah dapat dilihat kekhasan batik tulis tenun gedog tersebut.

Adapun tahapan atau waktu proses produksi untuk pembuatan sebuah batik tulis tenun gedog secara sederhana akan peneliti bagi dalam tiga tahapan. *Pertama*, adalah pekerjaan pemintalan. Pada tahap awal ini untuk setiap satu potong kain lawon dengan ukuran 90 x 250 cm memerlukan waktu sekitar 7 – 9 hari dengan kebutuhan benang lawe (*lawe yarn*) sebanyak lima ukel. *Kedua*, pekerjaan menenun. Dalam langkah kedua ini. Untuk menghasilkan satu potong lawon ukuran 90 x 250 cm memerlukan waktu hingga 5 hari kerja. Setelah langkah tersebut di atas selesai, maka pada langkah ketiga adalah pekerjaan membatik. Pada langkah terakhir ini adalah proses penyelesaian satu potong kain batik. Adapun untuk menyelesaikan satu potong kain batik ukuran 90 x 250 cm membutuhkan waktu sekitar 3 – 4 hari.[12]

Jadi untuk proses penyelesaian satu potong batik tulis tenun gedog khas Tuban ini memerlukan waktu kurang lebih 14 – 18 hari.

3. Dinas Indagkop

Dinas Indagkop (Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) adalah lembaga pemerintah yang didirikan untuk pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Lembaga bertempat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 86 di Tuban. Berikut ini akan kami jelaskan secara

[12] Wawancara dengan Uswatun, pada hari Senin tanggal 01 September 2008 di desa Kedungrejo Kecamatan Kerek Tuban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum tentang Dinas Indagkop (Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi).

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Tuban yang maju, mandiri dan tangguh di bidang usaha Industri, Perdagangan dan Koperasi yang berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah yang bertumpu pada mekanisme yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

b. Misi

1. Memperluas lapangan kerja melalui penciptaan dan pengembangan lapangan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat luas.
2. Mendorong perkembangan perdagangan yang efisien, efektif, adil dan transparan.
3. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintah agar koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih berdaya saing di dalam dan di luar negeri serta meningkatkan produktifitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Tugas Pokok

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam menjalankan tugasnya di bidang administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

d. Fungsi

1. Perumusan Kebijaksanaan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM serta promosi, Iklim Usaha dan Kerja Sama.
2. Penyusunan rencana dan pengorganisasian kegiatan dinas.
3. Pelaksanaan operasional kegiatan Dinas dan pelayanan umum.
4. Pengelolaan ketata usahaan Dinas
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Dinas.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Struktur Organisasi

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

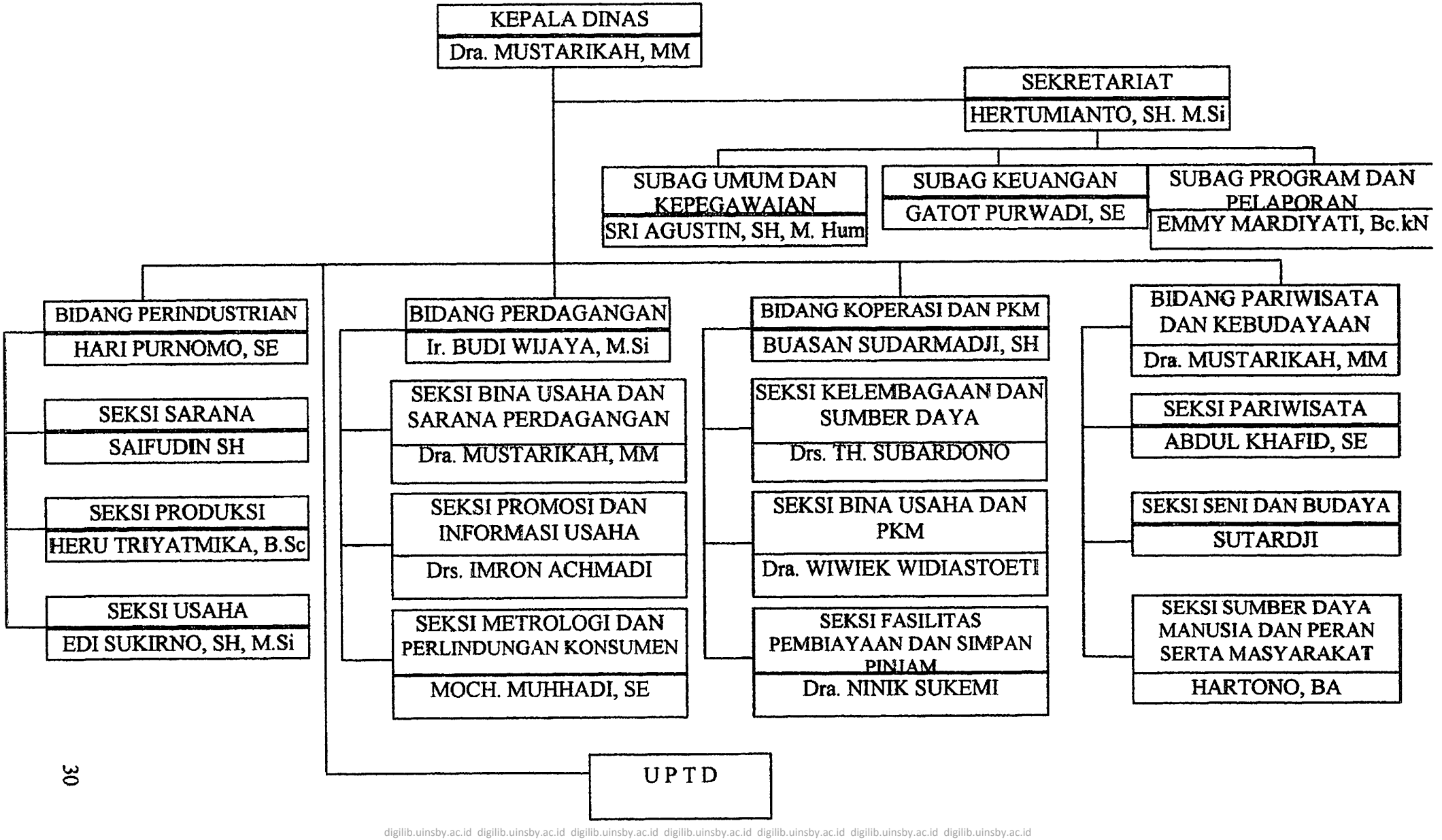

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai Perda No. 1 tahun 2001 Dinas Indagkop Kabupaten Tuban memiliki struktur organisasi yang terdiri dari : Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Sub Dinas. (Sub Dinas Perindustrian, Sub Dinas Perdagangan, Sub Dinas Koperasi dan PKM, Sub Dinas Promosi Iklim Usaha dan Kerjasama) serta kelompok Fungsional dan 5 (lima) UPTD (Pasar Baru, Pasar Hewan, Pasar Jatirogo, Pasar Bangilan, dan Pasar Montong).

Dari masing-masing Sub Dinas dan Bagian Tata Usaha terdiri dari 12 (dua belas) seksi dan 3 (tiga) Kasubag, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha Terdiri dari :
   a. Subag. Program dan Pelaporan.
   b. Subag. Keuangan.
   c. Subag. Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :
   a. Kasi Usaha
   b. Kasi Produksi
   c. Kasi Sarana
3. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
   a. Kasi Bina Usaha Sarana Perdagangan
   b. Kasi Pendaftaran dan Informasi perusahaan
   c. Kasi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
4. Sub Dinas Koperasi terdiri dari :
   a. Kasi Bina Usaha dan PKM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kasi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

c. Kasi Kelembagaan dan Sumber Daya.

5. Sub Dinas Promosi Iklim Usaha dan Kerja Sama terdiri dari :

a. Kasi Promosi dan Informasi

b. Kasi Iklim Usaha

c. Kasi Kerjasama

6. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) :

a. UPTD Pasar Baru Tuban.

b. UPTD Pasar Jatirogo

c. UPTD Pasar Bangilan

d. UPTD Pasar Montong

e. UPTD Pasar Hewan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tuban memiliki karyawan / wati Pegawai Negeri Sipil, di samping itu juga terdapat tenaga Kontrak / Paskun, yang kesemuanya ditempatkan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi juga pada UPTD pasar.

Adapun data Pegawai Negeri Sipil Dinas Indagkop Kabupaten Tuban menurut pangkat / golongan adalah sebagai berikut :

No	PANGKAT	GOLONGAN	BANYAKNYA
1	Pembina Utama Muda	IV/ C	1
2	Pembina Tk. I	IV/ B	3
3	Pembina	IV/ A	2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Penata Tingkat I	III/ D	17
5	Penata	III/ C	3
6	Penata Muda Tingkat I	III/ B	23
7	Penata Muda	III/ A	6
8	Pengatur Tingkat I	II/ D	10
9	Pengatur	II/ C	6
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/ B	11
11	Pengatur Muda	II/ A	11
12	Juru Tingkat I	I/ D	--
13	Juru	I/ C	--
Jumlah			**94**

Data Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Indagkop Kabupaten Tuban berdasarkan pangkat / golongan :

No	PANGKAT	GOLONGAN	BANYAKNYA
1	Penata Muda	III/ A	1
2	Pengatur Muda	II/ A	50
3	Juru	I/ C	12
4	Juru Muda	I/ A	28
Jumlah		--	**91**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Indagkop Kabupaten Tuban menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

No	TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA
1	S 2	7
2	S 1	27
3	Sarjana Muda	4
4	S L T A	39
5	S L T P	7
6	S D	9

Data Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Indagkop Kabupaten Tuban menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

No	TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA
1	S 1	1
2	S L T A	50
3	S L T P	12
4	S D	28

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Indagkop Kabupaten Tuban yang telah mengikuti diklat perjenjangan struktural adalah sebagai berikut :

No	TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA
1	Spamen	1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Spama / Sepadya	8
3	Adum	20

B. Kajian Penelitian Terkait

- **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Setelah mencari dari berbagai sumber penelitian yang terdahulu, peneliti tidak menemukan begitu banyak terkait dengan masalah pemberdayaan pengrajin. Dari beberapa karya ilmiah yang ada hanya terdapat satu penelitian yang terkait dengan masalah pengrajin.

Yakni skripsi yang ditulis oleh A. Sauqi, yang berjudul "Pengrajin Tampah di Jember (Etos Kerja Pengrajin Tampah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam Di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)" tahun 2007. Dalam skripsi ini, penelitiannya hanya lebih menekankan pada faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi etos kerja pengrajin tampah yang bisa bertahan hingga sampai saat ini. Dan bagaimana upaya pengembangan masyarakat pengrajin tampah di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Dalam karya ilmiah di atas dijelaskan bahwa pola etos kerja pengrajin tampah di Desa Sidomukti selalu dianjurkan untuk selalu bersifat tulus dalam bekerja karena bekerja merupakan rahmat Tuhan, dan penuh tanggung jawab karena merupakan amanah agama yang disampaikan melalui perantara wahyu-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ini pemberdayaan yang telah dilakukan sejak masa silam oleh para pengrajin adalah proses pembelajaran seorang ayah pada anaknya untuk melestarikan karyanya, sebagaimana yang diproses para pengrajin dalam perspektif pengembangan masyarakat. Seorang anak mendapat bimbingan dari seorang ayah dengan materi pembuatan tampah dari proses awal sampai proses jadi, kemudian sang anak membenarkan dan menjalankan hasil ajaran dari ayah sebagai lahan pijakan pencaharian dalam hidupnya merupakan sebuah bentuk peduli bagi seorang ayah kepada keluarga, lingkungan dan negaranya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id